# Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah dalam Pengadaan Jasa di SDN 1 Pasedan Kabupaten Rembang

**Dwi Ana Suasfifik*[1], Titik Hatyati[2], Maryanto[3]**
[1,2,3]Universitas PGRI Semarang, Indonesia
*E-mail: dwiana.suasfifik@gmail.com, titikharyati@upgris.ac.id, maryanto@upgris.ac.id*

**Article Info**
**Article History**
Received: 2025-07-07
Revised: 2025-08-18
Published: 2025-09-07

**Keywords:**
*SIPLah;*
*School Operational Assistance (BOS);*
*Services;*
*Procurement Management.*

**Abstract**
The implementation of the *Sistem Informasi Pengadaan Sekolah* (*SIPlah*) at SDN 1 Pasedan, Rembang Regency, represents a strategic shift in managing the procurement of goods and services in primary schools. This study aims to analyze the effectiveness of the SIPlah system within the procurement management cycle. A qualitative descriptive case study was conducted from December 2024 to June 2025 using triangulation techniques (interviews, observations, and documentation). Primary data were collected through direct engagement with the principal, treasurer, and teachers, while secondary data included planning documents (RKS, RKAS), activity reports, and meeting minutes. The findings reveal that procurement through SIPlah follows a structured management cycle involving planning, implementation, and evaluation. The planning phase is based on identifying school needs through team coordination and budget planning, although limited item availability on the SIPlah platform remains a challenge. Implementation is transparent and accountable, involving leadership from the principal and technical support from the operator, despite occasional technical disruptions and delivery delays. Periodic evaluations assess the quality, accuracy, and timeliness of received items and inform improvements in subsequent cycles. However, the lack of a standardized internal evaluation format persists. Overall, the study shows that SIPlah supports a dynamic and sustainable procurement system aligned with modern educational management principles, particularly *continuous improvement*. These findings highlight the importance of strengthening digital literacy, inter-staff collaboration, and technical training to maximize system utilization.

**Artikel Info**
**Sejarah Artikel**
Diterima: 2025-07-07
Direvisi: 2025-08-18
Dipublikasi: 2025-09-07

**Kata kunci:**
*SIPLah;*
*BOS;*
*Jasa;*
*Manajemen Pengadaan.*

**Abstrak**
Implementasi *Sistem Informasi Pengadaan Sekolah* (SIPlah) di SDN 1 Pasedan, Kabupaten Rembang, merepresentasikan pergeseran strategis dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem SIPlah dalam siklus manajemen pengadaan. Studi kasus deskriptif kualitatif dilakukan sejak Desember 2024 hingga Juni 2025 dengan teknik triangulasi (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Data primer diperoleh melalui keterlibatan langsung dengan kepala sekolah, bendahara, dan guru, sementara data sekunder mencakup dokumen perencanaan (RKS, RKAS), laporan kegiatan, dan notulen rapat. Temuan menunjukkan bahwa pengadaan melalui SIPlah mengikuti siklus manajemen yang terstruktur, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan didasarkan pada identifikasi kebutuhan sekolah melalui koordinasi tim dan perencanaan anggaran, meskipun keterbatasan ketersediaan barang di platform SIPlah masih menjadi tantangan. Pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan kepemimpinan kepala sekolah dan dukungan teknis dari operator, meskipun terkadang mengalami gangguan teknis dan keterlambatan pengiriman. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai kualitas, ketepatan, dan ketepatan waktu barang yang diterima serta menjadi dasar perbaikan di siklus berikutnya. Namun, belum adanya format evaluasi internal yang baku masih menjadi kendala. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa SIPlah mendukung sistem pengadaan yang dinamis dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan modern, khususnya *continuous improvement*. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital, kolaborasi antarstaf, dan pelatihan teknis untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem.

## I. PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan pesisir dan perkotaan, seperti di Kota Ambon, telah menjadi perhatian utama berbagai pihak karena dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurut Mainake dan Kamulyan (2012), kendala struktural seperti kurangnya tenaga pengelola, minimnya

infrastruktur pendukung, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah yang efektif. Hal ini diperparah oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang memperbesar volume sampah, sementara kapasitas pengelolaan masih terbatas. Sariyowan et al. (2024) menambahkan bahwa upaya modernisasi sistem pengelolaan sampah terhambat oleh kurangnya edukasi publik dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Selain aspek struktural, terdapat pula dimensi sosial dan budaya yang turut memperumit permasalahan ini. Praktik membuang sampah ke sungai atau laut, terutama di kawasan pesisir Ambon, tidak semata-mata disebabkan oleh kelalaian, melainkan mencerminkan konstruksi sosial yang terbentuk dari pengetahuan, kebiasaan, dan nilai yang diwariskan. Saptenno et al. (2022) menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, peningkatan volume sampah rumah tangga di wilayah pesisir Ambon berkorelasi dengan rendahnya literasi lingkungan masyarakat. Kebiasaan ini telah membentuk pola budaya yang sulit diubah tanpa adanya intervensi komunikasi yang strategis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga memperhitungkan konteks sosial-budaya masyarakat setempat.

1. Pengertian Jasa

   Jasa adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud dan dikonsumsi secara langsung. Dalam konteks sekolah, jasa mencakup layanan mengajar dari guru, bimbingan konseling, hingga kebersihan lingkungan sekolah. Jasa berbeda dari barang karena tidak menghasilkan kepemilikan benda fisik, bersifat abstrak, dan melibatkan hubungan interaksi langsung antara pemberi jasa dan penerima jasa (Hutabarat, 2021).

2. Pengadaan Jasa di Sekolah

   Pengadaan jasa di sekolah adalah proses pengadaan kebutuhan yang dilakukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan operasional sekolah. Proses ini harus dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, serta akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Kemendikbud, 2020).

   Dalam pelaksanaannya, sekolah merancang kebutuhan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan tim BOS. Sejak diberlakukannya sistem daring SIPLah, pengadaan dilakukan secara elektronik agar proses lebih transparan, dapat diawasi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. SIPLah juga mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam ekosistem pengadaan pendidikan (Kemdikbudristek, 2022; Puspitasari, 2021).

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) dalam pengadaan jasa di SDN 1 Pasedan, Kabupaten Rembang. Penelitian dilaksanakan selama Desember 2024 hingga Juni 2025 dengan lokasi di SDN 1 Pasedan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan data melalui teknik triangulasi (wawancara, observasi, dan dokumentasi), dengan langkah-langkah sistematis mulai dari penentuan topik, pengembangan fokus, pengumpulan dan pengolahan data, hingga pelaporan hasil. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, observasi, dan validasi konstruk untuk menjamin kesesuaian isi dengan teori yang digunakan.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap kepala sekolah, bendahara, dan dua guru yang terlibat aktif dalam proses pengadaan jasa melalui SIPlah. Peneliti mengumpulkan data melalui interaksi langsung di lapangan untuk memahami fenomena secara holistik dan alami. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi seperti RKS, RKAS, laporan kegiatan, notulen rapat, serta referensi teori dari buku dan jurnal. Seluruh data dikaji melalui proses validasi dan verifikasi untuk menjamin keabsahan serta relevansi terhadap fokus penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

1. Identifikasi Kebutuhan

   Identifikasi kebutuhan merupakan tahap awal dalam perencanaan pengadaan melalui SIPlah yang menitikberatkan pada pemetaan kebutuhan riil sekolah. SDN 1 Pasedan melaksanakan proses ini dengan pendekatan evaluatif terhadap penggunaan

anggaran tahun sebelumnya, koordinasi antarguru dan staf, serta pendataan dari tenaga administrasi. Fokus utama dalam tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh kebutuhan jasa yang menunjang proses pembelajaran dan operasional sekolah dapat terpetakan secara sistematis dan berbasis data.

Proses identifikasi dilakukan melalui tiga pendekatan: evaluasi realisasi anggaran tahun sebelumnya, penjaringan kebutuhan dari dewan guru, dan masukan dari staf administrasi terkait kebutuhan teknis seperti jaringan internet dan pelatihan penggunaan aplikasi. Kepala sekolah menjelaskan, "Kami menyusun daftar kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun kendala pelaksanaan. Masukan dari guru dan staf sangat penting, karena mereka yang tahu kebutuhan riil di lapangan" (KS/30/06/2025). Bendahara BOS menambahkan, "Sebelum menyusun RKAS, biasanya kami minta semua guru untuk membuat daftar kebutuhan pembelajaran di kelas masing-masing... Kami juga diskusikan bersama TU untuk melihat kebutuhan operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan SIPlah" (BD/30/06/2025).

Observasi menunjukkan bahwa sekolah menekankan kolaborasi dalam proses identifikasi ini. Dalam rapat, guru menyampaikan kebutuhan akan peningkatan layanan internet serta pelatihan terkait penggunaan platform daring. Operator sekolah mencatat masukan tersebut dan merumuskannya ke dalam rencana program pelatihan guru serta penguatan jaringan digital. Dokumen RKAS dan RKT 2025 juga menegaskan bahwa perencanaan diarahkan untuk mendukung strategi digitalisasi layanan pendidikan dan efisiensi pengadaan jasa. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa SDN 1 Pasedan telah melaksanakan identifikasi kebutuhan jasa dengan pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek pedagogis, teknis, dan manajerial.

2. Analisis Kebutuhan dan Prioritas

Setelah identifikasi dilakukan, SDN 1 Pasedan melanjutkan ke tahap analisis kebutuhan dan prioritas. Tahap ini bertujuan memilah kebutuhan mana yang paling mendesak dan berdampak besar terhadap mutu layanan pendidikan. Proses ini berbasis pada evaluasi penggunaan anggaran sebelumnya dan diskusi kolektif bersama guru, kepala sekolah, bendahara, serta pihak eksternal seperti komite dan pengawas sekolah.

Guru menjadi pihak utama dalam menyuarakan kebutuhan berdasarkan pengalaman di kelas. Guru kelas 3 menyatakan, "Kalau saya biasanya menyampaikan kebutuhan alat peraga dan buku-buku penunjang saat rapat awal tahun... kami tahu mana yang benar-benar dibutuhkan untuk membantu pembelajaran di kelas" (GR3/2/7/2026). Guru kelas 1 menambahkan pentingnya media konkret untuk siswa kecil, "*Seperti balok, kartu angka, atau poster sangat membantu. Tapi kadang jumlahnya terbatas. Itu yang sering saya sampaikan ke kepala sekolah*" (GR1/1/7/2026). Selain itu, komite sekolah dan pengawas juga turut memberikan masukan penting, seperti perlunya pelatihan guru dan peningkatan layanan pendidikan berbasis teknologi.

Hasil dari proses ini dituangkan dalam dokumen RKAS 2025 yang memuat program pelatihan guru, peningkatan literasi digital, dan penguatan kompetensi melalui penyediaan layanan pendidikan yang relevan. Bendahara menegaskan, "*Kami tidak asal menyusun program, semua berdasarkan masukan dari guru dan diskusi... kami susun skala prioritas mana yang harus didahulukan sesuai anggaran yang tersedia*" (BD/30/6/2025). Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data ini, analisis kebutuhan menjadi pijakan kuat dalam penyusunan rencana pengadaan jasa yang relevan dan efisien.

3. Penyusunan Program dan Anggaran

Tahap ketiga dalam perencanaan pengadaan melalui SIPlah adalah penyusunan program dan anggaran. Tahapan ini merupakan bentuk konkret dari hasil identifikasi dan analisis kebutuhan yang kemudian dituangkan dalam dokumen RKT dan RKAS. SDN 1 Pasedan menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan prioritas dan memastikan semua item dapat

diakomodasi melalui sistem SIPlah, sesuai regulasi.

Kepala sekolah menyampaikan, *"Kami menyusun program berdasarkan kebutuhan yang muncul dari hasil evaluasi tahunan dan masukan dari guru... Proses ini harus diselaraskan dengan ketentuan pengadaan melalui SIPlah*" (KS/30/6/2025). Sementara bendahara sekolah menjelaskan teknis penyusunan, *"Kami mencocokkan kebutuhan dari guru dan kepala sekolah dengan ketersediaan anggaran BOS. Setelah itu, kami masukkan rincian program ke dalam RKAS"* (BD/30/06/2025). Guru pun terlibat aktif, seperti guru kelas 3 yang mengusulkan program pelatihan portofolio pembelajaran, dan guru kelas 5 yang meminta penguatan literasi melalui jasa pelatihan berbasis asesmen nasional (Ob.1.2).

Dokumen RKT dan RKAS 2024 mencakup program seperti pelatihan guru, layanan peningkatan mutu pembelajaran, dan penguatan kapasitas tenaga pendidik. Komite sekolah menyoroti pentingnya fasilitas peningkatan keterampilan guru, "*Orang tua berharap ada pelatihan bagi guru agar lebih melek teknologi, karena anak-anak sekarang sudah terbiasa dengan perangkat digital*" (KM/21/6/2025). Pengawas menilai, "*Penyusunan RKAS-nya sudah mengarah pada solusi konkret atas masalah pembelajaran... dan cukup tertib menyelaraskan antara program, kebutuhan, dan sistem pengadaan berbasis SIPlah*" (PS/30/6/2025). Maka dari itu, tahap penyusunan program dan anggaran ini menjadi tulang punggung perencanaan yang menjamin ketercapaian tujuan pengadaan jasa secara efektif dan terukur.

4. Tahap Perencanaan sebagai Fondasi Utama

Perencanaan menjadi fase awal yang sangat krusial dalam siklus pengadaan melalui platform SIPLah. Proses ini menentukan arah dan efektivitas tahapan selanjutnya, terutama dalam konteks sekolah dasar seperti SDN 1 Pasedan yang berada di wilayah perdesaan dengan tantangan tersendiri dalam hal teknis dan sumber daya.

Menurut wawancara dengan kepala sekolah SDN 1 Pasedan, *"Perencanaan kami mulai dari pendataan kebutuhan di masing-masing kelas dan unit kerja, lalu dirangkum melalui rapat komite dan guru. Semua disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)."* Pernyataan ini menegaskan bahwa perencanaan pengadaan jasa tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga partisipatif dan akuntabel.

5. Pelibatan Tim Pengelola BOS

Proses perencanaan juga melibatkan Tim Pengelola BOS, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, guru, dan perwakilan komite. Kolaborasi ini penting untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban. Dalam wawancara, perwakilan komite menyampaikan, "*Kami dilibatkan untuk ikut menilai kebutuhan mana yang prioritas, dan kami juga menerima salinan rencana belanja dari sekolah*."

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pengadaan di SDN 1 Pasedan berbasis prinsip good governance: partisipatif, transparan, dan akuntabel.

6. Kendala dalam Tahap Perencanaan

Meskipun proses perencanaan sudah berjalan cukup sistematis, beberapa kendala tetap dihadapi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang paham teknis SIPLah. "*Kami masih belajar dalam teknis SIPLah, kadang bingung karena sistemnya terus update*," tutur operator sekolah. Selain itu, jaringan internet yang tidak stabil juga sering menghambat proses perencanaan berbasis daring.

7. Strategi Sekolah Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pihak sekolah aktif mengikuti pelatihan BOS dan SIPLah yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan. Mereka juga menjalin komunikasi intensif dengan sekolah lain sebagai sarana tukar pengalaman. Kepala sekolah menegaskan, "*Kami saling berbagi pengalaman dengan sekolah-sekolah tetangga yang sudah lebih dulu terbiasa dengan SIPLah."*

## B. Pembahasan

1. Perencanaan Kebutuhan Pengadaan

Perencanaan pengadaan merupakan tahapan awal dan fundamental dalam proses pengadaan jasa di satuan pendidikan. Di SDN 1 Pasedan, proses ini diawali dengan identifikasi kebutuhan

yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama tim BOS (Bantuan Operasional Sekolah), guru, dan bendahara sekolah

Kepala SDN 1 Pasedan menjelaskan bahwa penyusunan kebutuhan dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta kebutuhan pembelajaran yang aktual:

*"Kami selalu mulai dari mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya, lalu kami diskusikan apa saja yang benar-benar diperlukan untuk tahun ini. Misalnya, kalau tahun lalu sudah beli buku tema, maka tahun ini prioritas kami geser ke peralatan TIK untuk mendukung asesmen digital,"* (Wawancara, Kepala Sekolah, 10 Juni 2025).

Identifikasi ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk daftar kebutuhan yang mengacu pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS. Hasil identifikasi kebutuhan diklasifikasikan berdasarkan kategori (misalnya: alat tulis kantor, bahan ajar, sarana pendukung).

2. Penyusunan Rencana dan Penetapan Anggaran

Setelah kebutuhan teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana pengadaan dan alokasi anggaran yang dilakukan dalam forum rapat BOS. Dalam rapat ini, tim menyusun estimasi harga dengan merujuk pada katalog produk di dalam SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah).

*"Kami buka SIPLah untuk lihat kisaran harga barang-barang yang kami butuhkan, itu menjadi dasar kami menyusun anggaran di RKAS,"* (Wawancara, Bendahara Sekolah, 10 Juni 2025).

Anggaran pengadaan tersebut disesuaikan dengan plafon dana BOS yang diterima oleh sekolah dan diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara optimal. Dalam hal ini, transparansi dan partisipasi guru menjadi faktor penting dalam menentukan skala prioritas pembelian.

3. Pertimbangan dalam Pemilihan Produk dan Penyedia

Dalam menyusun perencanaan, pihak sekolah juga mulai mempertimbangkan ketersediaan penyedia barang/jasa di dalam platform SIPLah. Salah satu kendala yang diantisipasi adalah keterbatasan variasi produk atau penyedia lokal yang tersedia dalam sistem.

*"Kadang-kadang produk yang kita butuhkan tidak tersedia atau penyedianya dari luar kota, ongkirnya mahal. Jadi waktu perencanaan pun kami sudah lihat-lihat dulu siapa saja penyedianya,"* (Wawancara, Operator SIPLah Sekolah, 10 Juni 2025).

Aspek keberadaan penyedia lokal menjadi salah satu pertimbangan strategis karena berkaitan dengan efisiensi pengiriman dan kecepatan pemenuhan. Sekolah juga mencatat pengalaman tahun-tahun sebelumnya sebagai referensi untuk memilih penyedia yang terpercaya.

4. Dokumentasi dan Pengesahan Perencanaan

Semua hasil perencanaan pengadaan kemudian disusun secara tertulis dalam bentuk dokumen perencanaan yang disahkan oleh kepala sekolah dan dituangkan dalam sistem e-RKAS. Dokumen ini menjadi acuan dalam proses pengadaan di tahap selanjutnya, termasuk verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan penggunaan sistem SIPLah secara daring.

*"Kami harus pastikan semua dokumen lengkap dan sesuai dengan peraturan. Setiap langkah dari perencanaan sampai pengadaan itu bisa diaudit, jadi kami sangat berhati-hati,"* (Wawancara, Kepala Sekolah, 10 Juni 2025).

Kehati-hatian ini menunjukkan komitmen pihak sekolah terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana BOS melalui SIPLah.

5. Evaluasi dan Revisi Rencana

Sekolah juga menyediakan ruang untuk melakukan revisi terhadap perencanaan jika terjadi dinamika kebutuhan atau perubahan harga dalam platform SIPLah. Revisi ini dilakukan berdasarkan justifikasi kebutuhan baru dan tetap melalui mekanisme persetujuan internal sekolah serta pelaporan ke Dinas Pendidikan.

*"Kalau ada perubahan, misalnya harga naik drastis, kita lakukan revisi RKAS sesuai mekanisme. Tapi semua tetap transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,"* (Wawancara, Bendahara Sekolah, 10 Juni 2025).

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan ini juga dilakukan di akhir

tahun ajaran sebagai bahan perbaikan untuk siklus pengadaan tahun berikutnya.

6. Strategi Perencanaan Awal

Perencanaan pengadaan jasa di SDN 1 Pasedan dilakukan secara sistematis sebagai langkah awal pelaksanaan pengadaan berbasis daring melalui SIPlah. Perencanaan ini menjadi dasar pengelolaan anggaran dan kebutuhan sekolah yang disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 1 Pasedan mengungkapkan bahwa:

*"Kami menyusun perencanaan pengadaan berdasarkan usulan dari setiap guru kelas dan guru bidang studi. Dari situ kami kelompokkan mana yang prioritas, kemudian dituangkan dalam RKAS."* (Wawancara, 5 Juni 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan bersifat partisipatif dan melibatkan berbagai pihak di lingkungan sekolah, khususnya guru-guru sebagai pengguna langsung.

7. Identifikasi Kebutuhan dan Penyusunan RKAS

Identifikasi kebutuhan dilakukan secara bottom-up, dimulai dari kelas masing-masing. Guru kelas menyusun daftar kebutuhan yang kemudian dikompilasi oleh tim manajemen sekolah. Kebutuhan tersebut meliputi perlengkapan pembelajaran, peralatan kantor, hingga kebutuhan pemeliharaan fasilitas. Menurut salah satu guru:

*"Kami biasanya mengusulkan kebutuhan di awal tahun ajaran. Misalnya buku tambahan, alat tulis, atau kebutuhan pendukung lainnya. Kemudian dikaji oleh kepala sekolah dan tim BOS."* (Wawancara, 6 Juni 2025)

Penyusunan RKAS kemudian mengikuti pedoman teknis BOS dan mempertimbangkan hasil identifikasi tersebut. Perencanaan melalui RKAS ini menentukan jenis, volume, perkiraan biaya, dan waktu pengadaan.

8. Integrasi RKAS ke dalam SIPlah

Setelah RKAS disahkan oleh Dinas Pendidikan, tahap selanjutnya adalah integrasi data pengadaan ke dalam sistem SIPlah. Hal ini dilakukan oleh bendahara BOS atau operator sekolah yang ditunjuk. Penggunaan SIPlah menjadi keharusan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan.

*"Kami tidak bisa sembarangan membeli di luar sistem. Harus sesuai yang tercantum di RKAS dan dilakukan lewat SIPlah, agar bisa dipertanggungjawabkan."* (Wawancara, 6 Juni 2025, Bendahara BOS)

SIPlah memfasilitasi sekolah dalam memilih penyedia yang telah terdaftar dan terverifikasi. Hal ini mencegah praktik pengadaan yang tidak sesuai aturan dan mempercepat proses verifikasi keuangan.

9. Kendala dalam Tahap Perencanaan

Beberapa kendala dalam proses perencanaan mencakup kurangnya kapasitas SDM sekolah dalam menggunakan platform digital dan keterbatasan pemahaman mengenai spesifikasi teknis. Sebagaimana diungkapkan oleh operator sekolah:

*"Kadang kami bingung soal spesifikasi. Misalnya, laptop yang mau dibeli ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi minimal yang ditetapkan dinas."* (Wawancara, 6 Juni 2025)

Masalah lain adalah keterbatasan penyedia lokal yang tersedia di platform SIPlah. Hal ini menghambat pemenuhan kebutuhan mendesak yang tidak dapat segera dipenuhi oleh mitra SIPlah.

10. Strategi Sekolah Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak sekolah melakukan koordinasi rutin dengan dinas pendidikan dan mengikuti pelatihan penggunaan SIPlah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pembelajaran mandiri dan kolaborasi antar sekolah juga dilakukan.

*"Kami saling bertanya dengan sekolah lain, biasanya yang sudah lebih dulu paham tentang SIPlah. Juga rutin ikut bimtek yang diadakan dinas."* (Wawancara, 7 Juni 2025, Kepala Sekolah)

Melalui strategi ini, kapasitas perencanaan dan implementasi pengadaan di SDN 1 Pasedan meningkat secara bertahap.

Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa perencanaan pengadaan melalui SIPlah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rahayu (2021) yang

menekankan pentingnya kolaborasi dan literasi digital dalam pengadaan jasa berbasis daring di lingkungan pendidikan dasar.

Keterlibatan guru, kepala sekolah, dan operator dalam perencanaan memberikan kontribusi pada ketepatan kebutuhan serta efisiensi proses pengadaan. Namun, implementasi SIPlah juga memunculkan tantangan baru, seperti kesenjangan digital dan keterbatasan informasi spesifikasi teknis, yang perlu dijawab dengan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

11. Implementasi Perencanaan SIPlah dalam Pengadaan Jasa di SDN 1 Pasedan

Perencanaan implementasi SIPlah di SDN 1 Pasedan dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dimulai dari identifikasi kebutuhan oleh guru dan staf, dilanjutkan dengan analisis efektivitas penggunaan dari tahun sebelumnya. Kepala sekolah memastikan bahwa setiap rencana pengadaan terintegrasi dengan RKAS dan sesuai prioritas dana BOS. Proses ini mencakup pembentukan tim pelaksana, pembagian peran, serta penyesuaian dengan regulasi eksternal. Pendekatan partisipatif dalam forum musyawarah memperkuat rasa memiliki dan efektivitas implementasi. Secara teoritis, perencanaan ini mencerminkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah menurut Cheng (2023), yaitu responsif terhadap kebutuhan lokal, berbasis data, dan terarah pada peningkatan mutu pendidikan.

12. Implementasi Pelaksanaan SIPlah dalam Pengadaan Jasa di SDN 1 Pasedan

Pelaksanaan SIPlah di SDN 1 Pasedan menunjukkan keterpaduan antara kepemimpinan kepala sekolah, kolaborasi tim, dan pemahaman teknis sistem. Kepala sekolah berperan aktif sebagai pengarah dan motivator, memberikan kepercayaan kepada operator dan guru untuk menjalankan pengadaan sesuai alur SIPlah. Pembagian tugas yang jelas, komunikasi efektif, dan monitoring berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan. Kepala sekolah mendorong pemberdayaan staf, motivasi intrinsik, dan aktualisasi guru, sejalan dengan pendekatan School-Based Management. Seluruh tahapan pelaksanaan dilakukan dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, dan prinsip kolaboratif.

13. Implementasi Evaluasi SIPlah dalam Pengadaan Jasa di SDN 1 Pasedan

Evaluasi pelaksanaan SIPlah di SDN 1 Pasedan dilakukan secara formal melalui rapat BOS dan informal melalui pemantauan langsung kepala sekolah. Evaluasi mencakup aspek teknis dan manajerial, dengan keterlibatan guru, staf, dan komite sekolah sebagai bentuk akuntabilitas partisipatif. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan pengadaan berikutnya. Evaluasi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pembelajaran, bukan sekadar aspek administratif. Gambar alur implementasi mencerminkan siklus manajemen berkelanjutan yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, di mana keberhasilan tiap tahap saling menentukan dan dipengaruhi oleh kualitas keterlibatan seluruh warga sekolah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Pelaksanaan jasa melalui SIPlah di SDN 1 Pasedan telah mengikuti siklus manajemen yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan. Pada tahap perencanaan, pihak sekolah terutama kepala sekolah bersama tim pengelola BOS mengidentifikasi kebutuhan layanan berdasarkan kegiatan sekolah, menyusun RAB, serta berkonsultasi dengan operator SIPlah. Namun, keterbatasan mitra penyedia jasa di platform SIPlah sering menjadi kendala dalam pencarian layanan yang sesuai. Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan, melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan operator, dengan upaya memastikan layanan berjalan sesuai rencana. Meski demikian, sering kali ditemui kendala administratif dan teknis seperti prosedur sistem yang kompleks atau kesulitan konfirmasi penyedia jasa.

Evaluasi terhadap layanan yang diperoleh dilakukan secara berkala, dengan menilai kesesuaian pelaksanaan jasa terhadap perencanaan, kualitas layanan, serta ketepatan waktu penyelesaian. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan untuk pengadaan jasa selanjutnya, meskipun belum ada sistem evaluasi baku internal yang

diberlakukan secara menyeluruh. Secara umum, pelaksanaan jasa melalui SIPlah di SDN 1 Pasedan mencerminkan adanya penerapan prinsip manajemen strategis berbasis efisiensi dan akuntabilitas, yang terus berkembang guna mendukung tata kelola pendidikan yang lebih adaptif dan profesional.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan, disarankan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang memperkuat pelatihan teknis SIPlah, menyusun SOP penggunaan yang praktis, serta melakukan monitoring dan pendampingan berkala. Bagi SDN 1 Pasedan, kepala sekolah dan tim pengadaan perlu memperkuat kolaborasi internal, menyusun evaluasi pengadaan yang terdokumentasi, serta lebih aktif membandingkan penyedia di SIPlah. Sementara itu, guru dan staf diharapkan terlibat dalam identifikasi kebutuhan, memberikan umpan balik tertulis, serta mengikuti pelatihan penggunaan SIPlah untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi proses pengadaan.

**DAFTAR RUJUKAN**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Petunjuk teknis penggunaan sistem informasi pengadaan di sekolah (SIPlah)*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nurjanah, D. (2021). Partisipasi guru dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *6*(2), 88–97.

Permendikbud No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Pendidikan.

Rahmawati, S. (2020). Efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di sekolah dasar melalui sistem SIPlah. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, *4*(1), 25–35.

Setiawan, B. (2022). Tantangan implementasi SIPlah di sekolah dasar negeri: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Teknologi dan Administrasi Pendidikan*, *10*(3), 101–111.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Utami, R. (2020). Strategi kepala sekolah dalam mengelola pengadaan berbasis sistem daring. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengelolaan Sekolah*, *5*(1), 12–20.

Widodo, J. (2017). *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Prenadamedia Group.

Yusri, M. (2021). Analisis implementasi sistem informasi pengadaan sekolah melalui SIPlah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, *28*(2), 145–158. https://doi.org/10.21009/JAP.V28I2.145